

## ABSTRAK

**Shalahuddin.**2019. *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Musyawarah Dalam Bernegara*, Skripsi, Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah.Pembimbing : (I) Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum (II) Muhammad Haris, M. Kn.

**Kata Kunci:** Ulama, Musyawarah, Negara.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pendapat salah seorang ulama mengenai permasalahan musyawarah (*syuro*) dan demokrasi, sebagian ada yang memandang musyawarah (*syuro*) dan demokrasi itu adalah hal yang indentik. Namun, yang ingin diteliti disini adalah berfokus pada permasalahan musyawarahnya, bagaimana ulama memposisikan musyawarah dalam hal bernegara. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui pendapat ulama kota Banjarmasin tentang musyawarah dalam bernegara. (2) Mengetahui apakah musyawarah sama dengan demokrasi. (3) Mengetahuialasan yang digunakan terhadap pendapat tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana berkerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini mengambil lokasi kota Banjarmasin terbatas pada ulama yang masuk dalam ruang lingkup Majelis Ulama Indonesia kota Banjarmasin. Untuk memperoleh data yang dimaksud, peneliti menggunakan teknik wawancara, kemudian dilakukan pengolahan data dengan teknik *editing* dan deskripsi.Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (a) Ulama kota Banjarmasin ada yang berpendapat bahwa musyawarah dalam bernegara adalah wajib dan sunnah hukumnya. (b) Diantara ulama yang telah di wawancarai, ada 3 (tiga) orang yang menyatakan bahwa musyawarah bukanlah demokrasi dan ada 2 (dua) orang yang dirasa ragu dalam memberikan jawaban. (c) Antaramusyawah dan demokrasi memang ada perbedaan dan kesamaan. Namun demikian, bukan berarti musyawarah dan demokrasi itu sama.